

BAB III

KERANGKA TEORI

A. Agama

Agama adalah suatu sistem yang mengatur keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan budaya dan pandangan hidup yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan cerita suci yang dirancang untuk menjelaskan makna kehidupan dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moral, etika, hukum, agama, atau gaya hidup yang disukai. Banyak agama yang mungkin telah mengorganisir perilaku, kependetaan, mendefinisikan apa yang merupakan ketaatan atau kepemilikan, tempat-tempat suci dan kitab suci. Praktik keagamaan juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan atau pemujaan dewa atau dewi, pengorbanan, pesta, perjamuan, inisiasi, penguburan, pernikahan,

meditasi, doa, music, seni, tarian, atau aspek lain dari kehidupan manusia.¹

Agama dari bahasa sansakerta yang terdiri dari kata “A” tidak dan “gama” Kacau. Agama ialah peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengantar mereka hidup dalam keteraturan dan ketertiban.

Agama merupakan bagian penting dari proses tranformasi. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa agama memainkan peran kontruksif dalam perubahan yang sedang berlangsung di masyarakat. Max Weber, misalnya melihat sisi kontruksif dari etika protestan bagi tumbuhnya semangat kapitalisme. Kasus ini terkait dengan ajaran protestan yang melihat keberhasilan hidup di dunia sebagai cerminan dari kehidupan setelah kematian. Ada semangat yang kuat untuk mencapai berkat

¹ Ahmad Asir, *Agama dan Fungsinya Dalam Umat Manusia*, (Madura, 2021), Universitas Islam Madura UIM Pamekasan. h.2

dorongan agama yang sangat kuat. Hal yang sama berlaku untuk agama yang lainnya, termasuk Islam.

Agama selalu diterima dan dialami secara subjektif. Oleh karena itu orang sering mendefinisikan agama sesuai dengan pengalamannya dan penghayatannya pada agama yang dianutnya. Menurut “ Mufkti Ali”, mantan menteri agama Indonesia menyatakan bahwa agama adalah percaya akan adanya tuha yang maha esa. Dan hukum-hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat²

Selain itu agama memposisikan fungsinya sebagai sebuah pencarian terhadap yang maha suci atau aspek-aspek non material dari kehidupan. Pada

² Ahmad Toyib, “Relasi Agama dan Negara (Studi Kompratif Pemikiran K.H A. Wahid Hasyim dan KH, Said Aqil Siradji),” (Skripsi Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 51

perkembangannya, pengertian ini menjadi istilah untuk apa yang disebut sebagai religiusitas.³

Tidak sedikit pula yang melihat agama sebagai penghambat kemajuan, sehingga pada proses awal modernisasi, agama menjadi subordinat dari proses modernisasi, bahkan sebagian secara perlahan maupun sengaja menghilangkan agama. Agama dianggap sebagai candu yang membuai subjek dalam posisi lemah dan tidak mungkin mengangkat dirinya sendiri, sehingga agama menjadi legitimasi bagi peran minimalis kaum buruh atau yang tidak memilikinya. Pada titik ini, agama secara efektif tetap menjadi landasan untuk membangkitkan semangat berprestasi. Hanya saja model memahami dan memaknai ajaran agama terdistorsi oleh kepentingan kelompok borjuis.⁴

³ Fridayanti, "Regulitas, Spritualitas Dalam Kajian Psikologi dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam", *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 2 No 2 (Juni, 2015) UIN Sunan Gunung Djati, h. 203

⁴ A. Bakir Ihsan, Cucu Nurhayati, *Agama, Negara dan Masyarakat*, (Jakarta: Haja Mandiri, 2020) h.39

Dalam pandangan W.B. Sidjabat agama adalah bidang keilmuan yang netral dan tidak memihak dalam melakukan penelitian keagamaan, tokoh tidak hanya menggunakan satu Metodologi, tetapi menggunakan berbagai metodologi dalam satu penelitian, metodologi dapat digunakan dalam satu penelitian tergantung kepentingan dan individu yang melakukan penelitian agama, sehingga jenis ini dapat memperluas ilmu agama dan ruang lingkup ilmu agama. Seperti halnya F. Max Muller yang cenderung menggunakan pendekatan filologis dalam penelitiannya tentang agama hindu, peneliti agama lain juga menggunakan metodologi yang berbeda. Metodologi yang digunakan oleh berbagai eksponen agama sangat bergantung pada subjektivitas dan semangat dari peneliti yang terlibat.⁵

Di dalam *Okford Student Dictionary* yang dikutip Azra, dkk, Agama didefinisikan sebagai kepercayaan

⁵ Saifudin Zuhri Qudsy “ Agama dan Negara” *Jurnal Of Islamic Discourses*, Volume 11, No 2, (November 2019) Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h.233

akan adanya kekuatan gaib yang mengatur yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta. Agama dalam pengertian paling sering diartikan sebagai sistem orientasi dan objek pengabdian. Dalam pengertian ini, semua manusia adalah makhluk religius karena tidak ada yang bisa hidup tanpa sistem yang mengaturnya dan menjaga kesehatannya. Kebudayaan yang berkembang di antara manusia merupakan produk dari perilaku keagamaan manusia.

Pendapat berbeda lainnya dari pemikir A. Mukti Ali, menurutnya bahwa tidak ada kata yang paling sulit untuk dipahami dan didefinisikan selain dari kata agama. Setidaknya ada tiga alasan untuk ini. Pertama, karena pengalaman keagamaan ini bersifat intrinsik dan subjektif, ia juga sangat individualistis. Alasan kedua adalah bahwa mungkin tidak ada yang berbicara lebih bersemangat dan emosional daripada agama. Oleh karena itu, pembahasan tentang makna agama selalu memiliki emosi yang kuat, sehingga sulit untuk memberikan makna frasa (kata)

agama itu, dan alasan ketiga, bahwa konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan yang memberikan pengertian agama itu sendiri⁶

Dalam perspektif sosiologis Agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diekspresikan dalam perilaku sosial tertentu. Itu mengacu pada pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sehingga perilaku yang dilakukannya akan terikat dengan sistem kepercayaan dari ajaran yang dianutnya⁷

Melihat dari penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya agama ini merupakan sebagai bentuk pendekatan diri kepada sang maha kuasa, dan dalam hal ini kita selaku manusia harus percaya dan meyakini bahwa agama adalah sebagai penuntun kehidupan yang baik.

⁶ Burhanudin TR, *Islam Agamaku*, Buku Teks Pendidikan Agama Islam, (Subang : Royyan Press Juli 2016) h.5

⁷ M. Mukhsin Jamil. "Agama Agama Baru di Indonesia" (Pustakapelajar, Maret 2008) h.29

B. Negara

Negara berisi hakikat dan esensi karakteristik negara yang sesungguhnya. Sekali pun demikian rumusan definisi itu berada dalam alam gagasan manusia, sehingga tidak berbicara negara itu sendiri, tetapi deskripsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan negara. Definisi negara berkembang dalam sejarah pertumbuhan pemikiran manusia, dan pada umumnya, adalah hasil spekulasi filosofis. Definisi negara universal diterima jika didasarkan pada pemeriksaan berbagai pemikiran dan kemudian menurunkan sifat-sifatnya dari fakta umum. Definisi negara yang paling ideal menganggap realitas manusia sebagai makhluk politik.⁸

Negara secara teoritis, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang memaksa secara sah, lebih unggul daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Ada juga pendapat lain yang

⁸ Isharyanto “ Ilmu Negara” (Oase Pustaka : Juni, 2016), h.33

menyatakan bahwa negara adalah daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat atau yang berhasil mewajibkan warganya untuk taat melalui control kekuasaan. Sementara itu, bangsa adalah suatu kelompok yang memiliki kesamaan kehendak, berada dalam satu wilayah, dan ada kehendak untuk membentuk pemerintahan.⁹

Dalam teori politik Sunni, seperti halnya Ibn Tamiyah, Institusi Pemerintahan adalah simbol tertinggi syariah. Al-Mawardi sadar bahwa syariah menjadi pegangan bagi umat Islam. Namun, realitasnya tidak demikian, khalifah Abbasiyah menentukan lain. Barangkali inilah yang menjadi salah satu sebab ia menempuh jalan kompromi dalam perumusan teori politiknya sekalipun mengorbankan cita-cita syariah.¹⁰

⁹ Moh Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia" Jurnal Studi KeIslaman, Vol 14 (Juni 2014) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, h.6

¹⁰ Muhammad Amin, "Pemikiran Politik Al-mawardi" Jurnal Politik Profetik, Vol 04 (Makasar 2016) UIN Alaudin Makasar.

Istilah negara berasal dari terjemahan dalam bahasa asing yaitu sebagai berikut (a) *Staat* dalam bahasa belanda berarti negara (b) *State* dalam bahasa inggris berarti negara (c) *E'taat* dalam bahasa perancis berarti negara. Kata-kata ini diambil dari bahasa latin, status atau statum yang artinya menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan.¹¹

Negara merupakan suatu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan manusia. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada otoritas negara. Melalui kehidupan bernegara dengan kekuasaan di dalamnya, masyarakat ingin mencapai tujuan tertentu, seperti tercapainya ketentraman, ketertiban dan kebahagiaan masyarakat.¹²

Secara historis pengertian negara selalu berkembang dengan kondisi masyarakat saat ini.

¹¹ Muhammad Fauzan Naufal “Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia” UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017) h.21

¹² I Putu Ari Astawa “ *Negara dan Konstitusi*” (Bali :Universitas Udayana : 2017) h.5

Pengertian negara sebagian besar didefinisikan oleh para filsuf Yunani Kuno, ahli abad pertengahan, hingga abad modern

- a. Menurut Aristoteles, Negara adalah komunitas dari keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera untuk kehidupan yang sempurna dan berkecukupan
- b. Jean Bodin, sebuah negara sebagai pemerintahan yang diatur oleh beberapa keluarga, dan kepentingan bersama mereka oleh kedaulatan.
- c. Riger Soltau, negara adalah alata atau badan yang mengatur atau mengelola masalah bersama atas nama masyarakat.
- d. Robert M. Mac Iver, negara adalah organisasi yang memelihara ketertiban di wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan pemerintah dengan kekuasaan memaksa.

- e. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa negara adalah suatu wilayah-wilayah dimana orang diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil mengharuskan warga negara tunduk pada kekuasaan yang sah.¹³

Pada intinya, negara didirikan dan pemerintahan diselenggarakan atas dasar spirit ketuhanan. Meskipun demikian, wujud otoritas Tuhan sebagaimana tertuang dalam kitab suci, banyak dijabarkan secara makro dan global. Dalam tataran implementasi, Tuhan banyak “mendelegasikan” umat manusia untuk merumuskan sistem ketatanegaraan sesuai dengan panduan kitab suci dengan memerhatikan konteks realitas yang dihadapi masyarakat. Karena itu, Negara Islam sesungguhnya tidak identik dengan konsep teokrasi yang selalu mengatasnamakan

¹³ I Putu Ari Astawa, *Negara dan Konstitusi*.....,h.6

Tuhan tanpa penjabaran yang lebih konkret dalam hal pelaksanaannya.¹⁴

Tidak dapat disangkal lagi bahwa negara itu merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Alat itu berupa organisasi yang berwibawa. Organisasi disini diartikan sebagai bentuk bersama yang bersifat tetap.¹⁵ Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia, sebuah komunitas. Negara itu mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu mempunyai daerah tertentu, rakyat tertentu dan mempunyai pemerintahan. Negara berdiri bukan dengan sendirinya melainkan oleh rakyat. Negara adalah fenomena sosial dimana terdapat sejumlah besar manusia hidup rukun bersama dengan sistem hukum, dan dikendalikan oleh suatu kekuasaan.

¹⁴ Afifudin Muhajir, *Fiqh Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2017), h.25

¹⁵ Kunardi, dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 57

C. Politik

Politik dalam bahasa latin *politicus* dalam bahasa Yunani *politicos*, yang berasal dari kata *polis* yang bermakna Kota. Politik merupakan seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu negara yang mencakup beraneka ragam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisir serta cara bertindak untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Joyce Mitchel politik merupakan pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk seluruh masyarakat¹⁶

Sedangkan menurut Rod Hague politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya¹⁷

¹⁶ Inu Kencana, *Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010) h.46

¹⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.16

Konsep sistem politik merupakan suatu istilah mengacu kepada semua proses dan institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan publik. Perjuangan persaingan politik untuk menguasai secara politik adalah aspek yang utama dalam sistem politik.

D. Pergerakan Mahasiswa

1. Pengertian Pergerakan Mahasiswa

Pergerakan adalah identik dengan dengan istilah movement. Alasan mengapa disebut gerakan adalah karena arah perjuangan dilakukan melalui organisasi modern yang mendukung arah peningkatan kehidupan masyarakat Indonesia. Makna gerakan tersebut merupakan cerminan dari perasaan tidak puas dan tidak setuju terhadap sosial yang sangat memprihatinkan saat itu.¹⁸

Mahasiswa dalam peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 dijelaskan bahwa mahasiswa

¹⁸ Ahmadin, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, (Makasar, Rayhan Intermedia, 2017) h.2

adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan dan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi tertentu. Mereka adalah pembelajar regular di Universitas, Intitut, maupun Sekolah Tinggi.¹⁹ Namun menjadi mahasiswa mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar masalah administrative itu sendiri. Sedangkan mahasiswa dibagi menjadi dua suku kata yaitu maha dan siswa, maha artinya ter dan siswa artinya pelajar. Jadi dalam artian mahasiswa adalah terpelajar, maksudnya seorang mahasiswa tidak hanya mempelajari bidang ia pelajari tapi juga mengaplikasikan serta mampu menginovasi dan berkreatifitas tinggi dalam bidang tersebut.²⁰

Menurut Guardian Of Value mahasiswa adalah anda yang sudah dikatakan sebagai pelajar tingkat tinggi memiliki peran sebagai penjaga nilai-nilai masyarakat yang kebenarannya mutlak, yaitu

¹⁹ Indra Kusumah, *Risalah Pergerakan Mahasiswa*, h.15

²⁰ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-mahasiswa>. Diakses pada Minggu 12 Desember 2021.

menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, gotong royong, integritas, empati, dan sifat lain yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat lainnya.²¹

Mahasiswa merupakan asset masa depan bangsa, karena merekalah yang paling berpeluang untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana keduanya menjadi alat penyelesai utama masalah dalam kehidupan berbangsa masa kini dan masa mendatang, mahasiswa juga sebagai kelompok strategis yang memiliki peluang untuk mengembangkan idealismenya, karena dengan idealisme dapat berkembang dengan subur jiwa semangat untuk membangun solidaritas bersama memikirkan dan memenuhi kebutuhan bersama.

Mahasiswa merupakan *agent of change* (agen perubahan) yang diharapkan dapat mewujudkan perubahan dari bangsa ini, peran mahasiswa dalam melakukan perubahan tidak cukup hanya itu saja,

²¹ <https://www.studinews.co.id/mahasiswa-adalah/> Diakses pada Senin 13 Desember 2021

melainkan mahasiswa bisa menjadi pelaku perubahan tersebut. Karena sikap kritis yang dimiliki mahasiswa sering membuat perubahan besar. Tentunya perubahan itu diharapkan kearah yang positif.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pergerakan mahasiswa merupakan asset masa depan bangsa, karena merekalah yang paling berpeluang untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana keduanya menjadi alat penyelesai utama masalah dalam kehidupan berbangsa masa kini dan masa mendatang, mahasiswa juga sebagai kelompok strategis yang memiliki peluang untuk mengembangkan idealismenya, karena dengan idealisme dapat berkembang dengan subur jiwa semangat untuk membangun solidaritas bersama memikirkan dan memenuhi kebutuhan bersama.

Mahasiswa merupakan agent of change (agen perubahan) yang diharapkan dapat mewujudkan perubahan dari bangsa ini, peran mahasiswa dalam

melakukan perubahan tidak cukup hanya itu saja, melainkan mahasiswa bisa menjadi pelaku perubahan tersebut.

2. Sejarah Pergerakan Mahasiswa

Gerakan mahasiswa lahir dalam kondisi yang dihadapi masyarakat yang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita negara dan harapan masyarakat. Ada kesenjangan antara kenyataan dan harapan ideal. Gerakan mahasiswa menanggapi situasi dan kondisi yang berbeda atas dasar hati nurani moral, tanggung jawab intelektual, pengabdian sosial dan perhatian sosial. Gerakan mahasiswa selalu muncul sebagai pelopor dan inisiator dari sebuah aksi-aksi sejenis dari unsur-unsur sosial politik lain. Dalam eskalasi gerakan, gerakan mahasiswa terkadang beraliansi dengan elemen-elemen kekuatan lainnya sampai tujuan perjuangan tercapai.²²

²² Indra Kusumah, *Risalah Pergerakan Mahasiswa,h.14*

Sejarah panjang keberadaan bangsa Indonesia saat ini seringkali dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai proses perjuangan sebuah keluarga yang cukup panjang. Sejarah Indonesia yang panjang tersebut sering dianalog dengan sebuah perjalanan yang sudah barang tentu tidak dibayangkan lurus. Pembentukan Indonesia saat ini dimulai dengan pergerakan generasi muda yang dimotori oleh mahasiswa yang dimulai oleh keberadaan sejumlah titik yang merupakan tonggak sejarah pergerakan yang merupakan penanda yang sangat penting dari suatu perjalanan adalah angkatan-angkatan yang memiliki karakteristik tersendiri. Angkatan tersebut dalam proses perjuangan dimulai dari angkatan 1908, 1928, 1945, 1996, 1971 dan 1998 yang mana hampir semua pergerakan dari masing-masing angkatan tersebut dimotori oleh mahasiswa yang merupakan bagian agent of change.

E. Hubungan Agama dan Negara

Agama dan negara merupakan dua hal yang memang sangatlah sulit untuk dipisahkan dari kehidupan manusia. Agama dan negara seperti sebuah fitrah kehidupan yang harus diterima oleh manusia. Pentingnya Agama dan Negara bagi manusia terletak pada seberapa besar pentingnya manusia memuliakan kehidupannya. Atau setidaknya, sejauh mana manusia ingin memanusiaikan dirinya sendiri²³

Di sisi lain dalam agama Islam, agama dan negara memang tidak bisa dipisahkan namun bukan berarti bahwa antara keduanya itu identik. Karena itu agama dan negara dalam Islam, meskipun tidak terpisahkan, namun tetap dibedakan : tidak terpisah, namun berbeda, karena itu, dari sudut pandangan Islam, pernyataan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler artinya bukan negara yang menganut sekularisme berupa pemisahan

²³ Ahmad Sadzali, *Relasi Agama dan Negara, Terokrasi, Sekuler, Tamyiz*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Islam, 2018) hl. 2

negara dari agama dan bukan pula negara teroraksi, artinya (bukan negara yang kekuasaannya dipegang oleh para pendeta, rohaniawan, atau *ecclesiastics, abbar, rubban*), dapat dibenarkan.²⁴

Menurut Yusuf al-Qaradwi, penting adanya penegasan tentang hubungan agama dan Negara. Hal itu dilakukan secara komprehensif mengangkat sisi vital Islam yang dilengkapi oleh hukum dan nilai-nilai Islam yang terkait dengan Negara, baik dari segi penataan maupun pengarahannya sesuai dengan hukum dan adat Islam. Kemudian menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem Islam yang mengandung pengertian yang luas dan menyeluruh, berlaku untuk segala zaman dan tempat serta untuk semua manusia.²⁵ Karena pada dasarnya hakikat agama adalah kemampuan dalam diri manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

²⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta, Paramadina 1998)

²⁵ Zulkifli Hasan, *Yusuf al-Qaradawi and Contribution of His Thoughts*, Jurnal GJAT, Vol 3 (Juni 2013) Universitas Islam Sains Islam Malaysia.

Dengan hal diatas kita dapat memperoleh gambaran bahwa manusia dapat menentukan menentukan dirinya dalam tindakannya itu apakah ia akan berbuat baik atau akan berbuat buruk, apakah perbuatan baik yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak tuhan ataukah bertentangan dengan tuhan. Maka agama agama seseorang berperasaan di dalam menentukan baik buruknya tindakan yang dilakukan, maka perlulah di dalam kehidupan manusia mempunyai segi pandangan agama, sehingga keseluruhan dari jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah atau Negara benar-benar menyadari akan perlunya mempunyai pengalaman akan norma agama yang berlaku didalam masyarakat, sedangkan dalam pelaksanaanya dapat sesuai dengan hati nurani manusia.²⁶

Ada dua asumsi pokok yang melandasi perbedaan pemikiran tentang hubungan agama dan negara dalam

²⁶ Wardoyo, “ Agama dan Manusia, *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. X No 11 (Jnuari—Juni 2014), Fakultas Ushuludin dan Dakwah, IAIN Surakarta, h.82

konteks Indonesia, yakni : pertama, masalah hubungan politik antara Islam dan negara muncul dan berkembang dari pandangan-pandangan yang berbeda di kalangan pendiri republik ini tentang bagaimanakah Indonesia yang dicita-citakan, kedua, hubungan politik antara Islam dan negara yang kurang baik tidak muncul dari doktrin Islam sendiri, melainkan dari bagaimana Islam diartikulasikan secara sosio-kultural, ekonomis dan politis di Indonesia.²⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa agama dan negara sulit untuk dipisahkan, bukan berarti keduanya bisa untuk disatukan, penyatuan itu tidaklah membawa implikasi berdirinya sebuah negara teoraktis, sebuah isitilah yang lagi-lagi dipergunakan oleh golongan orang-orang nasionalis sekuler dalam menentang ide negara Islam di Indonesia. Namun pada kenyataannya bagi mayoritas beragama Islam, tetap memperhatikan unsur-unsur agama dalam kehidupan berbangsa dan

²⁷ Muhamad Anang Firdaus “ Relasi Agama dan Negara, Telaah Historis dan Perkembangannya, Jurnal multi kultural dan multireligius Vol 13 (Desember 2014) h.172

bernegara, bahkan setelah negara tersebut berhasil menyelesaikan modernisasi dan sekularisasi politik dengan proses globalisasi yang bersamaan.

Dalam Islam banyak para ulama tradisional yang bergumentasi bahwa Islam sebagai sistem kepercayaan dimana agama terkait erat dengan politik. Islam memberikan pandangan hidup dan makna bagi kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah politik. Dalam pandangan ini, pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Akhirnya, ditemukan pendapat tentang konsep hubungan antara agama dan negara.

Dalam kaitannya dengan negara dan pemerintahan, serta prinsip dasar, setidaknya terdapat tiga teori terkait tentang relasi agama dan negara.

a. Integralisme

Adanya kesatuan antara Islam dan negara, menurut pandangan ini, konsep hubungan anatara agama dan negara membentuk satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua institusi terpadu. Ini menunjukkan bahwa negara adalah konstitusi politik dan agama. Pemerintahan negara didasarkan pada kedaulatan ilahi, atau dengan kata lain, pandangan ini mensyaratkan adanya negara bagi umat Islam dengan gaya negara teoraktis, umumnya menegaskan Islam (Syariah) adalah sebagai konstitusi negara dan cara suksesi kepemimpinan cenderung terbatas dan tertutup.²⁸ Menurut Marzuki Wahid dan Rumadi dalam kaitan relasi agama dan negara bahwa antara agama dan negara menyatu, menurut teori ini kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi, karena pendukung teori ini

²⁸ Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam*, Jurnal *Kuriositas* Vol 11, No.2 (Desember, 2017) Institut Agama Islam Negeri Manado, h. 114

meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada ditangan tuhan. Selanjutya sesuai dengan Visi KAMMI yang berbunyi wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara yang Islami, KAMMI berpandangan agama dan negara adalah suatu yang integral, adanya penyatuan anantara keduanya.

b. Simbiosisme

Hubungan antara agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai alat untuk melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara membutuhkan agama, karena agama juga membantu negara membudayakan moralitas, etika dan spritualitas. Anantara agama dan negara adalah

dua identitas yang berbeda. Tetapi mereka saling membutuhkan, sehingga konstitusi yang berlaku dalam dalam pandangan ini tidak hanya muncul dari adanya kontrak sosial, tetapi juga dapat diwarnai oleh hukum agama (syariat). Dalam teori ini Ibnu Tamiyah berpandangan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karenanya tanpa kekuasaan negara agama tidak bisa berdiri tegak. Artinya bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan.²⁹

c. Sekularisme

Menurut Azzam Tamami sekularisme adalah sebuah konsep yang diperkenalkan ke dunia muslim bersama dengan istilah-istilah lain seperti modernitas, westernisasi,

²⁹ Hufron, Relasi Negara dan Agama, “*Analisis Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan 1945*”, (Oktober 2017) h.4

modernisasi sebagai akibat dari kolonialisme barat. Bersamaan dengan istilah sekularisme lainnya, sering menyiratkan pembebasan politik dari otoritas agama, tetapi juga digunakan dalam konteks lainnya untuk menggambarkan proses yang bertujuan untuk marginalisasi Islam. Menurut Peter L. Berger sekuler merupakan sebuah proses dimana sector-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan.